

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KETAATAN  
ATURAN AKUNTANSI, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN  
MORALITAS INDIVIDU TERHADAP KECENDERUNGAN  
KECURANGAN AKUNTANSI  
PADA OPD KABUPATEN MAGELANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



**Disusun Oleh:  
Ari Khoirul Fajri  
17.0102.0012**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TAHUN 2019**

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KETAATAN  
ATURAN AKUNTANSI, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN  
MORALITAS INDIVIDU TERHADAP KECENDERUNGAN  
KECURANGAN AKUNTANSI  
PADA OPD KABUPATEN MAGELANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Di Susun oleh:  
**Ari Khoirul Fajri**  
17.0102.0012

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2019**

# SKRIPSI

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI,  
KESESUAIAN KOMPENSASI DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP KECENDERUNGAN  
KECURANGAN AKUNTANSI  
PADA OPD KABUPATEN MAGELANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

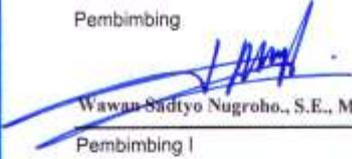
**Ari Khoirul Fajri**

**NPM 17.0102.0012**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal **20 Agustus 2019**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

  
Wawan Sadyo Nugroho, S.E., M.Si., Ak., CA.

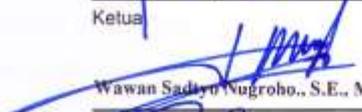
Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

  
Nur Hafid Vunani, S.E., M.Sc., Ak.

Ketua

  
Wawan Sadyo Nugroho, S.E., M.Si., Ak., CA.

Sekretaris

  
Farida, S.E., M.Si., Ak., CA

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana S1

tanggal **NOV 2019**

**Dra. Marlina Kurnia, MM**

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Khoirul Fajri  
NIM : 17.0102.0012  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KETAATAN  
ATURAN AKUNTANSI, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN  
MORALITAS INDIVIDU TERHADAP KECENDERUNGAN  
KECURANGAN AKUNTANSI PADA OPD KABUPATEN MAGELANG**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi atau karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 1 Agustus 2019

Pembuat Pernyataan,



  
Ari Khoirul Fajri

NPM 17.0102.0012

## RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Ari Khoirul Fajri  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Magelang, 6 April 1994  
**Agama** : Islam  
**Status** : Belum Menikah  
**Alamat Rumah** : Ds. Prembulan 04/01, Kelurahan Tegalarum,  
Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.  
**Alamat E-mail** : ariakuntansi99@gmail.com

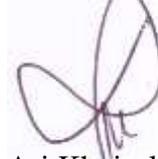
### **Pendidikan Formal :**

Sekolah Dasar : MI Negeri Tegalarum (2000-2006)  
SMP : SMP Negeri 1 Borobudur (2006-2009)  
SMA : SMA Negeri 1 Salaman (2009-2012)  
Perguruan Tinggi :  
- D-3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  
Negeri Yogyakarta (2012-2015)  
- S-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Magelang (2017-  
2019)

### **Pendidikan Non Formal**

- Brevet Pajak A & B (2015)
- Sertifikasi Audit Internal Bank (2018)

Magelang, 1 Agustus 2019  
Peneliti,



Ari Khoirul Fajri  
NPM 17.0102.0012

## **MOTTO**

*“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

(QS. Al Baqarah: 286)

*“Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti berperang di jalan Allah hingga pulang.”*

(H.R. Tirmidzi)

*“Tidak pernah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen untuk menyelesaikan.”*

(Penulis)

## KATA PENGANTAR



Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA OPD KABUPATEN MAGELANG”**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Saru (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.

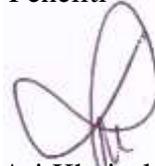
Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dra. Marlina Kurnia, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
2. Nur Laila Yuliani, SE., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Wawan Sadtyo Nugroho, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan.
5. Seluruh responden atas kesediaannya mengisi kuesioner yang telah saya berikan.

6. Serta berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Apabila dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini memberikan manfaat nyata bagi kemajuan bersama.

Magelang, 1 Agustus 2019  
Peneliti



Ari Khoirul Fajri  
NPM 17.0102.0012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kontribusi Penelitian .....	10
a. Teoretis .....	10
b. Praktis .....	11
E. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS</b>	
A. Telaah Teori .....	13
1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	13
2. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi ( <i>Fraud</i> ) .....	16
3. Sistem Pengendalian Internal .....	20
4. Ketaatan Aturan Akuntansi .....	24
5. Kesesuaian Kompensansi .....	29
6. Moralitas Individu .....	30
B. Telaah Penelitian Sebelumnya .....	31
C. Perumusan Hipotesis .....	35
D. Model Penelitian .....	39
<b>BAB III METODA PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	40
B. Populasi dan Sampel .....	40
1. Populasi .....	40
2. Sampel .....	40
C. Data Penelitian .....	41
1. Jenis dan Sumber Data .....	41
2. Teknik Pengumpulan Data .....	41
D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel .....	42

E.	Metoda Analisis Data .....	44
	1. Uji Validitas Data .....	45
	2. Uji Reliabilitas.....	46
F.	Pengujian Hipotesis .....	47
	1. Analisis Regresi Linier Berganda.....	47
	2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	48
	3. Uji F.....	48
	4. Uji t.....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	51
	1. Deskriptif Data Penelitian .....	51
	2. Karakteristik Responden .....	52
	3. Statistik Deskriptif.....	54
B.	Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas .....	56
	1. Pengujian Validitas .....	56
	2. Pengujian Reliabilitas.....	58
C.	Pengujian Hipotesis.....	60
	1. Analisis Regresi Linier Berganda.....	60
	2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	61
	3. Uji F.....	62
	4. Uji t.....	63
D.	Pembahasan .....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Keterbatasan Penelitian.....	72
C.	Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Telaah Penelitian Sebelumnya .....	31
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel.....	42
Tabel 4.1 Hasil Analisis Pengembalian Kuesioner .....	52
Tabel 4.2 Karakteristik Responden .....	52
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif .....	54
Tabel 4.4 Pengujian Validitas .....	57
Tabel 4.5 Tabel <i>Cross Loading</i> .....	57
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas Variabel.....	59
Tabel 4.7 Uji Regresi Linier Berganda .....	60
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi .....	62
Tabel 4.9 Uji F .....	63
Tabel 4.10 Uji t .....	64

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Temuan Kasus Korupsi Pemerintah Daerah di Lingkup Eks-Karesidenan Kedu.....	4
---	---

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Penelitian .....	39
Gambar 2. Uji F.....	49
Gambar 3. Uji t.....	50
Gambar 4. Nilai Kritis Uji F .....	63
Gambar 5. Pengujian Hipotesis 1 dengan t-Test.....	64
Gambar 6. Pengujian Hipotesis 2 dengan t-Test.....	65
Gambar 7. Pengujian Hipotesis 3 dengan t-Test.....	65
Gambar 8. Pengujian Hipotesis 4 dengan t-Test.....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian .....	80
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian.....	83
Lampiran 3. Hasil Pengembalian Responden .....	90
Lampiran 4. Tabulasi Data.....	91
Lampiran 5. Bukti Penerima Pembagian Kuesioner .....	106
Lampiran 6. Hasil Output SPSS.....	109

## ABSTRAK

### **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA OPD KABUPATEN MAGELANG**

Oleh :  
**Ari Khoirul Fajri**

Maraknya berita mengenai indikasi kecurangan akuntansi di dalam pengelolaan keuangan negara semakin membuat sadar bahwa perlu dilakukan tindakan untuk membenahi ketidakberesan tersebut. Jenis kecurangan yang paling sering terjadi dalam entitas pemerintahan adalah korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara korelasi pengaruh sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini merupakan tipe penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga ditemukan 116 responden yang merupakan pegawai di bagian keuangan dalam lingkungan OPD Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan uji validitas, reliabilitas, koefisien korelasi, koefisien determinasi, analisis regresi linier berganda, uji  $R^2$ , uji F, dan uji t dengan bantuan program IBM SPSS versi 25.0. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Moralitas individu berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

**Kata Kunci** : Kecenderungan kecurangan akuntansi, Sistem pengendalian internal, Ketaatan aturan akuntansi, Kesesuaian kompensasi, Moralitas individu.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia dalam reformasi sedang menghadapi tantangan yang berhubungan dengan masalah kecurangan, kolusi, nepotisme, dan penggelapan lainnya. Sehingga dalam proses verifikasi secara objektif yang terdokumentasi secara sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit untuk menentukan apakah aktivitas, kejadian, dan kondisi, sistem atau informasi tersebut sesuai dengan kriteria audit. Serta mengkomunikasikan hasil proses tersebut kepada klien (Iqbal, 2003).

Di era reformasi seperti saat ini dengan fenomena banyaknya tuntutan dari masyarakat terhadap *good government governance* mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan, efisiensi dan lebih akurat. Bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan kinerja keuangan suatu pemerintahan kepada publik berupa Laporan Keuangan. Sejalan dengan adanya penerapan otonomi daerah, laporan keuangan merupakan salah satu bagian yang rentan terhadap perilaku *fraud*. Karena pada umumnya otonomi daerah mengakibatkan pendelegasian wewenang pemerintah pusat banyak dilimpahkan ke daerah, sehingga berpotensi memindahkan *fraud* dari pusat ke daerah juga lebih banyak (Fajarina, 2012). Padahal laporan keuangan

merupakan sumber informasi penting dalam organisasi sebagai alat komunikasi publik dan pengambilan keputusan.

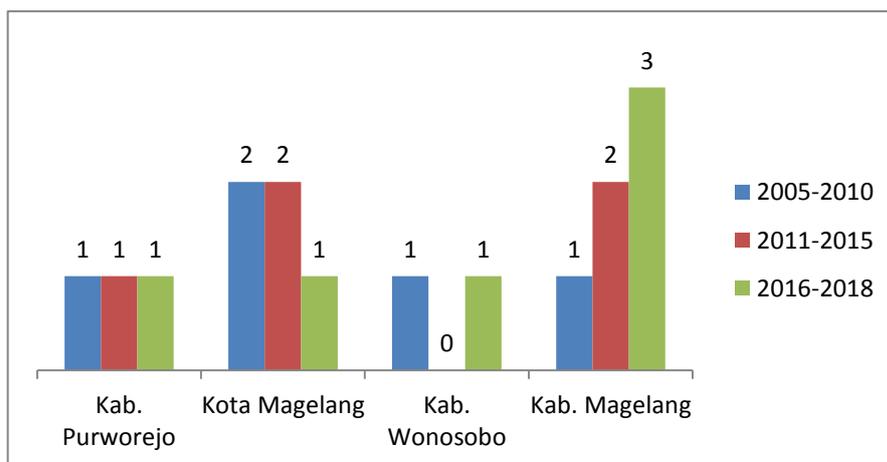
*Fraud* merupakan konsep pelanggaran yang memiliki sudut pandang yang luas. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menyebutkan *fraud* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (Yudistira, *et al.* 2017). Menurut Sawyer (2006) *fraud* adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja oleh individu atau kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan dalam penelitian Tessa (2016) bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi adalah sikap-sikap tertentu yang cenderung memiliki arah yang menyimpang dari pokok atau asas utama akuntansi. Menurut *Association of Certified Fraud Examiner*, *fraud* (kecurangan) terdiri dari kecurangan laporan, penyalahgunaan aset, dan korupsi.

Jenis kecurangan yang paling sering terjadi dalam entitas pemerintahan adalah korupsi. Menurut Wilopo (2006) tindakan korupsi yang umumnya dilakukan adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen dan *mark up* yang dapat merugikan keuangan negara. Berdasarkan hasil survey transparansi internasional pada tahun 2017, Indonesia menempati posisi 96 dari 180 negara dengan nilai CPI (*Corruption Perception Index*) sebesar 37

(news.detik.com. 2017). Hal ini diperkuat dengan banyaknya kasus penyalahgunaan dan penggelapan anggaran negara di pemerintahan, seperti dikutip dari publikasi *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat ada 576 kasus korupsi di tahun 2017. Kasus tersebut merugikan negara sebesar Rp 6,5 triliun dan nilai suap Rp 211 miliar dengan jumlah tersangka sebanyak 1.298 tersangka dimana jumlah terbanyak berasal dari aparatur sipil negara (ASN) dari lingkup pemerintah daerah dan kementerian sebanyak 495 kasus (antikorupsi.org, 2017).

Berdasarkan database Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, jumlah kasus korupsi yang terjadi di Jawa Tengah tahun 2018 berjumlah 222 kasus. Jumlah tersebut naik 7 kasus dari tahun 2017 yang berjumlah 215 kasus. Kasus korupsi yang sering muncul antara lain yang berkaitan dengan APBD, buku ajar, bansos serta hibah dan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah (Sukirman, 2018).

Sejak beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan temuan kasus korupsi di pemerintah daerah di lingkup eks-Karesidenan Kedu. Berdasarkan temuan kasus-kasus tersebut, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah masih belum baik. Fajarina, dkk (2012) mengemukakan bahwa penerapan otonomi daerah mengakibatkan pendelegasian wewenang pemerintah pusat banyak dilimpahkan ke daerah kabupaten/kota sehingga berpotensi memindahkan *fraud* dari pusat ke daerah juga lebih banyak.



Sumber: <https://www.wawasan.com>

### Grafik 1. Temuan Kasus Korupsi Pemerintah Daerah di Lingkup Eks-Karesidenan Kedu

Berdasarkan pada grafik di atas, Kabupaten Magelang merupakan bagian dari wilayah eks-karisidenan juga tidak luput dari sorotan media terkait temuan kasus korupsi. Kabupaten Magelang mengalami peningkatan yang statis dari tahun 2005-2018. Beberapa temuan kasus korupsi yang dipublikasikan oleh media menyangkut tindak pidana tersebut seperti dilansir dari [www.wawasan.com](http://www.wawasan.com) yang memberitakan bahwa pada tahun tahun 2007-2008 terdapat kasus korupsi yang merugikan negara. Selanjutnya pada tahun 2011 kembali ditemukan kasus korupsi. Pada tahun 2011-2015 salah satu instansi di Kabupaten Magelang menyebabkan kerugian negara atas kasus korupsi. Kasus korupsi selanjutnya yang ditemukan di Pemerintahan Kabupaten Magelang yaitu pada tahun 2016. Pada tahun 2018, kembali ditemukan kembali kasus korupsi yang merugikan negara.

Setiap kegiatan pada suatu Pemda harus dicatat dan pada akhir tahun harus dihasilkan laporan keuangan. Pemerintah mengeluarkan PP No.71

Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah yakni metode “*Accrual Basis*” dan setiap Pemda di Indonesia harus melakukan pencatatan pelaporan keuangannya dengan metode tersebut. Metode ini dinilai lebih efektif dan mempunyai peranan dalam menekan tindakan korupsi karena dalam pencatatannya metode Akruial lebih detail tanpa harus memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sehingga dalam penyajian pelaporannya pun akan lebih detail dan terperinci.

Dampak positif yang dihasilkan dari penerapan metode Akruial Basis adalah memberikan pelaporan keuangan dicatat secara transparan sesuai aliran hak kewajiban yang ada. Di harapkan pula transparansi ini bisa menghasilkan kepercayaan dari semua pihak, baik itu dari masyarakat maupun *stakeholder* pemerintah, sehingga diharapkan memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia. Akuntan merupakan profesi yang sangat penting dalam sebuah perusahaan ataupun instansi, akuntan yang mengerti akan pelaporan keuangan, dan akuntan bisa menjadi tembok besar bagi para koruptor bila dalam pelaksanaan teknis kegiatannya tetap berpegang teguh sesuai dengan sistem akuntansi yang telah di tetapkan.

Maraknya berita mengenai indikasi *fraud* di dalam pengelolaan keuangan negara semakin membuat sadar bahwa perlu dilakukan tindakan untuk membenahi ketidakberesan tersebut. Menurut Ruslan (2011), diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam menanggulangi terjadinya *fraud* dengan menggunakan pemikiran yang jelas. Hal pertama yang harus diidentifikasi adalah penyebab utama terjadinya *fraud* sehingga bisa

dirumuskan strategi yang tepat untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi intensitas yang ditimbulkan dari *fraud* tersebut. Hal ini kemudian yang disebut sebagai pencegahan *fraud*.

Faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu keefektifan sistem pengendalian internal (Amalia, 2015). Pengendalian internal yang lemah dapat memberikan kesempatan untuk melakukan perilaku tidak etis sehingga terjadi kecurangan akuntansi yang dapat merugikan suatu entitas (Shintadevi, 2015). Sistem pengendalian internal sangat penting bagi suatu entitas, antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap suatu entitas dari kelemahan manusia serta mengurangi tindakan untuk melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan (Fitri, 2016).

Pada Semester I tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan terhadap 670 objek pemeriksaan yang terdiri dari instansi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. BPK menemukan 6.531 kasus yang berhubungan dengan lemahnya Sistem Pengendalian Internal ([bpk.go.id/3](http://bpk.go.id/3) Desember 2018).

Ketua BPK, Harry Azhar Azis, menuturkan, pada semester I 2015, BPK melakukan pemeriksaan terhadap 666 objek yang terdiri atas 117 pada Pemerintah Pusat, 518 pada Pemda dan BUMD, 31 objek BUMN serta lainnya. Pada pemeriksaan semester I ini, BPK lebih fokus pada laporan

keuangan pusat dan daerah. Dari hasil pemeriksaan, BPK menemukan 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan, yang meliputi 7.890 (51,12%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (nasional.sindonews.com/6 Oktober 2015).

Masih banyak instansi pemerintah yang bermasalah dengan ketaatan aturan akuntansi. Padahal ketaatan aturan akuntansi merupakan hal yang wajib dilakukan. Jika instansi tidak menaati aturan akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya, maka dimungkinkan akan terjadi kecurangan akuntansi. Semakin tinggi tingkat ketaatan pada aturan akuntansi, maka kecurangan akuntansi akan semakin rendah.

Selain itu kesesuaian kompensasi juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi (Ahriati, 2015). Kesesuaian kompensasi sangat berpengaruh terhadap perilaku pegawai atau karyawan, biasanya seseorang akan berperilaku tidak etis dan berlaku curang untuk memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri karena ketidakpuasan atau kekecewaan dengan kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan (Shintadevi, 2015). Pemberian kompensasi yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pegawai dan mengurangi tingkat kecurangan (*fraud*).

Menurut Radhiah (2016) faktor yang mempengaruhi adanya tindakan kecurangan akuntansi selanjutnya yaitu moralitas individu. Moralitas merupakan kualitas mengenai baik buruknya perilaku seseorang. Seseorang

yang tidak bermoral cenderung akan bertindak untuk melakukan kecurangan yang akan merugikan bahkan membahayakan orang lain. Individu dengan moralitas yang tinggi diharapkan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis dan tidak melakukan kecurangan akuntansi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi (Yulianti, 2016). Suatu entitas yang memiliki penalaran moral yang tinggi lebih cenderung menghindari perbuatan yang mengarah kepada kecurangan akuntansi (Radhiah, 2016).

Penelitian ini mengacu pada riset yang dilakukan oleh Gustina(2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian internal, dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD Kabupaten Indragili Hulu. Perbedaan penelitian ini yaitu **pertama**, penelitian ini menambahkan variabel kesesuaian kompensasi. Alasan penambahan variabel kesesuaian kompensasi, karena menurut Amalia (2015), pemberian kompensasi yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pegawai yang secara tidak langsung berperan sebagai *bonding cost* sehingga mampu mengurangi tingkat kecurangan (*fraud*).

Hal tersebut ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ahriati, dkk (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, perilaku tidak etis dan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur. Namun, terdapat penghilangan variabel dari penelitian Ahriati, dkk yaitu variabel

perilaku tidak etis dengan alasan perilaku tidak etis sudah dijelaskan dalam variabel ketaatan aturan akuntansi.

Perbedaan penelitian yang **kedua** yaitu penambahan variabel moralitas individu. Alasan penambahan variabel moralitas individu, karena menurut Radhiah (2016), moralitas dalam kecenderungan *fraud* berperan sebagai pengendali yang paling dasar karena dalam *fraud* dimulai dari individu yang berketatanan dalam moral, sehingga moralitas individu dalam mekanisme biaya keagenan berada dalam lingkup *bonding cost*. Hal tersebut ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Udayani dan Sari (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Individu terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada OPD Kabupaten Magelang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
4. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

### **D. Kontribusi Penelitian**

#### **1. Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang Pengauditan, khususnya masalah keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi dan moralitas individu terhadap kecurangan akuntansi.

## **2. Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran kepada instansi terkait, berkenaan dengan peningkatan sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi dan moralitas individu untuk mengurangi kecurangan akuntansi. Penelitian ini merupakan sebuah kesempatan untuk menerapkan ilmu yang terkait dengan pengauditan yang telah didapat di bangku kuliah.

## **E. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat gambaran dan pandangan mengenai permasalahan yang ditemukan. Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka mengenai teori-teori dasar yang digunakan untuk menganalisis data yang ditemukan. Selain itu pada bab ini ditentukan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

### **BAB III METODA PENELITIAN**

Bab ini berisi tinjauan tentang metode penelitian sebagai dasar dalam langkah-langkah analisis data yang ditemukan.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya beserta pembahasannya. Selain itu pula disajikan data-data dan analisis yang berkaitan dengan permasalahan.

#### BAB V KESIMPULAN

Bab ini meliputi kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini serta saran untuk pihak-pihak yang terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang menggambarkan hubungan antara dua individu yang berbeda kepentingan yaitu *principal* (pemilik usaha) dan *agent* (manajemen suatu usaha). Masalah keagenan (*agency problem*) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross (1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyebutkan manajer suatu perusahaan sebagai ‘agen’ dan pemegang saham sebagai ‘*principal*’. Pemegang saham yang merupakan *principal* mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini, bahwa agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik *principal*.

Upaya mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan yang akan ditanggung oleh *principal* maupun agen. Teori yang dikembangkan oleh Jensen and Meckling (1976) yang pertama *monitoring cost* merupakan biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku agen, yaitu mengukur, mengamati, dan mengontrol

perilaku agen. Kedua, *bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Ketiga, *residual loss*, merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan *principal*.

Persektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu *corporate governance* dan *earning management*. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *Good Corporate Governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan *corporate governance* berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak.

Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka

menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Sefiana, 2009).

Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan *principal* dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang.

Pengelola perusahaan biasanya lebih banyak mengetahui tentang informasi internal perusahaan dibandingkan pemegang saham (*principal*). Oleh karena itu, para pengelola berkewajiban untuk menyampaikan informasi operasional perusahaan kepada pemegang saham sebagai tanggungjawab yang dilakukan oleh pengelola. Pemegang saham menilai kinerja manajer perusahaan dalam menjalankan operasional sesuai dengan kontrak yang telah disetujui bersama. Manajer akan terus berusaha untuk memenuhi permintaan dari *principal*. Namun, kadang ada hal-hal yang sengaja dilakukan oleh pengelola perusahaan contohnya seperti memberikan informasi yang bukan sebenarnya, manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pengelola dan manajer (Tessa, 2016). Hal tersebut yang bisa menimbulkan konflik antara kedua pihak.

Adanya perbedaan atau ketidaksesuaian informasi antara *principal* dan agen maka *principal* harus memonitor dan mengontrol lebih ketat lagi

sehingga meminimalisir kecurangan yang akan dilakukan oleh pengelola perusahaan. Menurut Eisenhardt (1989) terdapat tiga dasar jenis asumsi sifat dasar manusia di dalam *agency theory* yaitu :

- a. Manusia pada umumnya egois atau mementingkan diri sendiri dan tidak melihat kepentingan orang lain (*self interest*).
- b. Manusia memiliki intelek terbatas mengenai pemahaman pada masa yang akan datang (*bounded rationality*).
- c. Manusia akan selalu menghindari risiko (*risk averse*).

Melihat dari tiga asumsi sifat dasar manusia dalam *agency theory* tersebut maka para pengelola akan selalu mementingkan kepentingan pribadinya untuk mendapatkan keuntungan dan bonus dari perusahaan dengan cara yang tidak benar atau manipulasi laporan keuangan atau tidak memberikan informasi yang sebenarnya kepada pemegang saham (Meckling, 1976).

## **2. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)**

*Fraud* atau yang sering dikenal dengan istilah kecurangan merupakan hal yang sekarang banyak dibicarakan di Indonesia. Pengertian *fraud* itu sendiri merupakan penipuan yang sengaja dilakukan, yang menimbulkan kerugian pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan dan atau kelompoknya (Sukanto, 2009). Albrecht (2003) mendefinisikan *fraud* sebagai representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan ditindaklanjuti

oleh korban dan kerusakan korban. Dalam bahasa aslinya *fraud* meliputi berbagai tindakan melawan hukum.

Bologna (Amrizal, 2004) mendefinisikan kecurangan “*Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver*” yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara financial dari tindakannya tersebut. Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu (1) tindakan/*the act.*, (2) penyembunyian/*the concealment* dan (3) konversi/*the conversion*.

ACFE (Tuanakotta, 2010) membagi *fraud* (kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu:

a. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial.

b. Penyimpangan atas Aset (*Asset Misappropriation*)

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

c. Korupsi (*Corruption*)

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*) dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, yang sering disebut teori GONE (Pusdiklatwas BPKP, 2008) yaitu:

- a. *Greed* (keserakahan)
- b. *Opportunity* (kesempatan)
- c. *Need* (kebutuhan)
- d. *Exposure* (pengungkapan)

Faktor *greed* dan *need* merupakan faktor yang berhubungan dengan pelaku *fraud* atau disebut faktor individu. Adapun faktor *opportunity* dan *exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban.

a. Faktor generik

Faktor generik yang meliputi *opportunity* (kesempatan) dan *exposure* (pengungkapan) merupakan faktor yang berada pada pengendalian organisasi. Pada umumnya kesempatan melakukan *fraud* selalu ada pada setiap kedudukan, hanya saja adanya kesempatan besar maupun kecil tergantung kedudukan pelaku menempati kedudukan pada manajemen atau pegawai biasa. Adapun pengungkapan berkaitan dengan kemampuan dapat diungkapnya dapat diungkapnya suatu *fraud*, dan sifat serta luasnya hukuman bagi pelakunya. Semakin besar pengungkapan *fraud* yang terjadi, maka kemungkinan pelaku melakukan *fraud* semakin kecil.

b. Faktor individu

Faktor individu yang meliputi *greed* (keserakahan) dan *need* (kebutuhan) merupakan faktor yang ada pada diri masing-masing individu, dengan arti berada diluar pengendalian organisasi. Faktor ini terdiri atas dua unsur yaitu:

- 1) *Greed factor*, yaitu moral yang meliputi karakter, kejujuran dan integritas yang berhubungan dengan keserakahan.
- 2) *Need factor*, yaitu motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan seperti terlilit hutang atau bergaya hidup mewah.

Menurut Amrizal (2004) pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membangun struktur pengendalian yang baik Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan, COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) pada bulan September 1992 memperkenalkan suatu rerangka pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian intern terdiri atas 5 (lima) komponen yang saling terkait yaitu: (a) Lingkungan pengendalian (*control environment*) (b) Penaksiran risiko (*risk assessment*) (c) Standar Pengendalian (*control activities*) (d) Informasi dan komunikasi (*information and communication*) (e) Pemantauan (*monitoring*)
- b. Mengefektifkan aktivitas pengendalian (a) Review kinerja (b) Pengolahan informasi (c) Pengendalian fisik (d) Pemisahan tugas
- c. Meningkatkan kultur organisasi Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- d. Mengefektifkan fungsi internal audit.

### **3. Sistem Pengendalian Internal**

Seperti telah diuraikan dalam pendahuluan, pengendalian intern didefinisikan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern

terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang **handal**, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pengendalian intern akuntansi

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

b. Pengendalian administratif

Pengendalian ini dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

SPI merupakan suatu langkah nyata bagi pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Muttaqin dan Sudarno (2012) menyebutkan sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (1) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor; (2) pemisahan tugas; (3) otorisasi yang

memadai atas transaksi-transaksi; (4) pemeriksaan independen atas kinerja; dan (5) penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat.

Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain: (a) adanya perlindungan fisik terhadap harta; (b) pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan; (c) adanya jejak audit yang baik; dan (d) sumber daya manusia yang optimal. Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan adanya pengendalian intern: (1) Menjaga kekayaan organisasi/mengamankan asset, (2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, (3) Mendorong efisiensi, (4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.
- b. Komitmen terhadap kompetensi.

- c. Kepemimpinan yang kondusif.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah kegiatan pengendalian pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah.
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah.
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

#### **4. Ketaatan Aturan Akuntansi**

Ketaatan adalah patuh atau menaati aturan yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aturan adalah suatu cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya dituruti atau dilakukan. Dalam suatu instansi, tentu saja terdapat aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan. Begitu juga dengan kegiatan akuntansi suatu instansi yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan akuntansinya.

Rahmawati (2012) menyatakan bahwa standar akuntansi disusun untuk menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi tersebut terdiri atas pedoman-pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menyajikan laporan keuangan. standar akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan disebut Standar Akuntansi Pemerintah

Ketaatan aturan akuntansi dalam suatu instansi memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai prinsip dan metode yang dijadikan dasar untuk diterapkan dalam penyelenggaraan segala aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan yang berbasis kepada standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas segala jenis transaksi dan peristiwa ekonomi khususnya pada bidang keuangan yang terjadi dan untuk pelaporan keuangannya.

Menurut UU Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan standar akuntansi pemerintahan merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ialah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan suatu persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dimana dengan adanya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang relevan, andal, komparatif dan dapat diverifikasi.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah yang berdasarkan pada Pemendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Menurut Pemendagri Nomor 64 Tahun 2013 kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna

laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Menurut Baswir (2000) ruang lingkup dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu meliputi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangan. Laporan keuangan ditujukan untuk tujuan umum pelaporan keuangan bukan untuk semata-mata memenuhi kebutuhan khusus pemakainya.

Menurut Baswir (2000) tujuan dari pelaporan keuangan pemerintahan harus dapat menyajikan informasi bagi penggunaannya dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Karakteristik kualitatif dari informasi keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi dari tujuan pelaporan keuangan itu sendiri, dan memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Nordiawan dan Putra, 2009).

Menurut Tanjung (2007) lingkungan akuntansi pemerintahan memiliki ciri-ciri yang perlu dipertimbangkan kaitannya dengan untuk menetapkan tujuan akuntansi dan dalam pelaporan keuangan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan merupakan bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan, otonomi pada sistem pemerintahan dan transfer pendapatan antar pemerintah, adanya pengaruh politik dan adanya hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.
- b. Keuangan pemerintah penting bagi pengendalian ditandai dengan anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian, investasi dalam aset yang tidak langsung

menghasilkan pendapatan dan kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

Menurut Tanjung (2007), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. Karena pelaporan keuangan memiliki peranan sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen, membantu pengguna laporan untuk mengevaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kebijakan secara periodik sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan umum.
- c. Transparansi, hasil pelaporan keuangan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat umum memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan antar generasi, membantu pengguna dalam mengetahui penerimaan pemerintah secara periodisasi untuk membiayai seluruh pengalokasian dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Thoyibatun (Shintadevi, 2015) menjelaskan beberapa indikator Ketaatan Aturan Akuntansi, yaitu:

- a. Persyaratan pengungkapan
- b. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik
- c. Objektif
- d. Memenuhi syarat kehati-hatian
- e. Memenuhi konsep konsistensi penyajian

## **5. Kesesuaian Kompensasi**

Menurut Griffin (2004), kompensasi adalah remunerasi financial yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2001) menyatakan kompensasi merupakan salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan meningkatkan kinerja pegawai. Dengan kata lain, kompensasi adalah pengganti dari suatu hal dalam bentuk lainnya yang cukup memberikan rasa keadilan tertentu pada seseorang.

Dalam lingkup bisnis, maka kompensasi adalah pengganti dari jasa pekerjaan dalam bentuk gaji, bonus, maupun tunjangan-tunjangan pekerjaan lainnya. Umumnya tujuan pemberian kompensasi selain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi pegawai juga bertujuan untuk menunjukkan penghargaan dan perlakuan adil organisasi terhadap pegawainya. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik yang harus

dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi tempat ia bekerja. Menurut Veithzal (2006), kompensasi yang diberikan kepada pegawai terdiri dalam dua bentuk yaitu :

a. Kompensasi yang bersifat financial

Bentuk kompensasi ini ada dua macam, yaitu kompensasi langsung, terdiri dari pembayaran karyawan dalam bentuk upah, gaji, bonus, atau komisi. Kompensasi tidak langsung atau benefit, terdiri dari semua pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi financial langsung yang meliputi liburan, berbagai macam asuransi, jasa seperti perawatan anak atau kepedulian keagamaan, dan sebagainya.

b. Kompensasi yang bersifat non financial

Bentuk kompensasi ini seperti pujian, menghargai diri sendiri, promosi jabatan, dan pengakuan yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan, produktifitas, dan kepuasan.

## **6. Moralitas Individu**

Moral adalah suatu tindakan seseorang untuk orang lain yang memiliki nilai positif (Fitri, 2016). Sedangkan menurut Amalia (2015) moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan disadari sebagai kewajiban mutlak. Pemerintahan yang baik akan terbentuk dengan adanya moralitas yang baik. Seseorang bisa dikatakan

bermoral apabila perilakunya mencerminkan moralitas, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Moralitas individu akan mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi moralitas individu, semakin individu memperhatikan kepentingan yang universal daripada kepentingan organisasinya maupun individunya (Prawira, 2014).

Menurut Amalia (2015) moral dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia. Moral murni disebut juga hati nurani.
- b. Moral terapan, adalah moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofis, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia.

## B. Telaah Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2.1. Telaah Penelitian Sebelumnya**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Muna, B.N & Harris, L (2018)	Pengaruh Pengendalian Internal dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Penelitian Persepsi Pengelola Keuangan Pada Perguruan Tinggi Negeri Blu)	pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi ( <i>fraud</i> ). Beberapa indikator yang menjadi kategori bahwa pengendalian internal telah berjalan efektif, antara lain: (a) pelaksanaan aturan telah dilakukan sesuai dengan SOP ( <i>Standart Operational Procedure</i> ) yang berlaku. (2) siklus dari perencanaan hingga pertanggung jawaban dilakukan secara baik. (3) pelaksanaan evaluasi kinerja telah

Tabel 2.1. Penelitian Relevan (Lanjutan)

No	Nama	Judul	Hasil
2	Gustina, I (2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu	dilakukan secara rutin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan sistem pengendalian intern dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3	Sari, N.L.P.P, Gede A.Y, & Adiputra, I.M.P (2015)	Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi <i>Good Governance</i> Terhadap Kecenderungan <i>Fraud</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial efektivitas system pengendalian internal, Ketaatan aturan akuntansi, Persepsi kesesuaian kompensasi dan Implementasi <i>good governance</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>fraud</i> . Secara simultan efektivitas sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, persepsi kesesuaian kompensasi dan implementasi <i>good governance</i> berpengaruh simultan negatif terhadap kecenderungan <i>fraud</i>
4	Dewi, C.K.R (2017)	Pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi empiris pada SKPD Kab. Bengkalis)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif sebesar 53% terhadap kecenderungan <i>fraud</i>

**Tabel 2.1. Penelitian Relevan (Lanjutan)**

No	Nama	Judul	Hasil
5	Shintadevi, P. F (2015)	Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening Pada Universitas Negeri Yogyakarta	(1) Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Keefektifan Pengendalian Internal dengan Perilaku Tidak Etis, (2) Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Ketaatan Aturan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis, (3) Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Kesesuaian Kompensasi dengan Perilaku Tidak Etis, (4) Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Keefektifan Pengendalian Internal dengan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, (5) Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Ketaatan Aturan Akuntansi dengan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, (6) Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Kesesuaian Kompensasi dengan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.
6	Ahriati, D., Basuki, P., & Widiastuty, E (2015)	Pengaruh sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur	(1) sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi; (2) ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi; (3) kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi; (4) secara simultan variabel bebas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Pemda Kab Lombok Timur.
7	Udayani, A.A.F & Sari, M.R (2017)	Pengaruh sistem pengendalian internal dan moralitas individu	(1) sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi; (2) moralitas individu

**Tabel 2.1. Penelitian Relevan (Lanjutan)**

No	Nama	Judul	Hasil
		terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi	berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi; (3) sistem pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
8	Rahmaidha, T.R (2016)	Pengaruh Pengendalian internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi pada SKPD di Kota Magelang)	Hasil penelitian ini menunjukkan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi
9	Damayanti, D.N.S (2016)	Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan Akuntansi (studi eksperimen pada pegawai bagian keuangan dan akuntansi)	(1) Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi; (2) moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi; (3) pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.
10	Tarigan, L.Br (2016)	Pengaruh moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi pada BUMD Provinsi Riau)	Moralitas individu dan pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan asimetri informasi dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Sumber: beberapa artikel yang diolah, 2019.

### C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Sistem pengendalian intern merupakan suatu langkah nyata bagi pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan (Karyono, 2013). Sistem pengendalian intern dirancang untuk menyediakan keyakinan yang menandai berkaitan dengan tujuan beberapa kategori yaitu efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pencegahan konflik. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh *principal* atas apa yang dilakukan oleh agen. Sistem pengendalian internal adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency cost*. Pengendalian internal sangat penting bagi suatu entitas, antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap suatu entitas dari kelemahan manusia serta mengurangi tindakan untuk melakukan kecurangan yang tidak sesuai dengan aturan (Fitri, 2016).

Penelitian Eliza (2015) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi. Sejalan dengan penelitian tersebut, Gustina (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal juga berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jadi,

semakin efektif sistem pengendalian internal maka kecenderungan kecurangan akuntansi semakin berkurang.

**H1** : Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2. Pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Ketaatan aturan akuntansi adalah patuh atau menaati aturan terkait sistem akuntansi yang ada. Dalam suatu instansi, tentu saja terdapat aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan (Rahmawati, 2012). Begitu juga dengan kegiatan akuntansi suatu instansi yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan akuntansinya. Ketaatan aturan akuntansi dalam *fraud* berkedudukan sebagai *bonding cost* yang menempatkan mekanisme dalam menjamin agen tetap dalam kepentingan *principal*.

Penelitian Thoyibatun (2012) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian Rahmawati (2012) juga menunjukkan hasil yang sejalan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sejalan dengan penelitian di atas, Rahmaidha, T.R (2016) dan Ahriati, D., Basuki, P., & Widiastuty, E (2015) berpendapat ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

**H2** : Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

### 3. Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Kesesuaian kompensasi adalah ketepatan remunerasi finansial yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka (Griffin, 2004). Kesesuaian kompensasi sangat berpengaruh terhadap perilaku pegawai atau karyawan, biasanya seseorang akan berperilaku tidak etis dan berlaku curang untuk memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri karena ketidakpuasan atau kekecewaan dengan kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan (Shintadevi, 2015). Pemberian kompensasi yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pegawai yang secara tidak langsung berperan sebagai *bonding cost* sehingga mampu mengurangi tingkat kecurangan (*fraud*).

Penelitian Amalia (2015) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sari, et al. (2015) dalam penelitiannya menguatkan hal tersebut dengan menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sejalan dengan hal tersebut, Shintadevi, P. F (2015) dan Dewi, C.K.R (2017) berpendapat bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

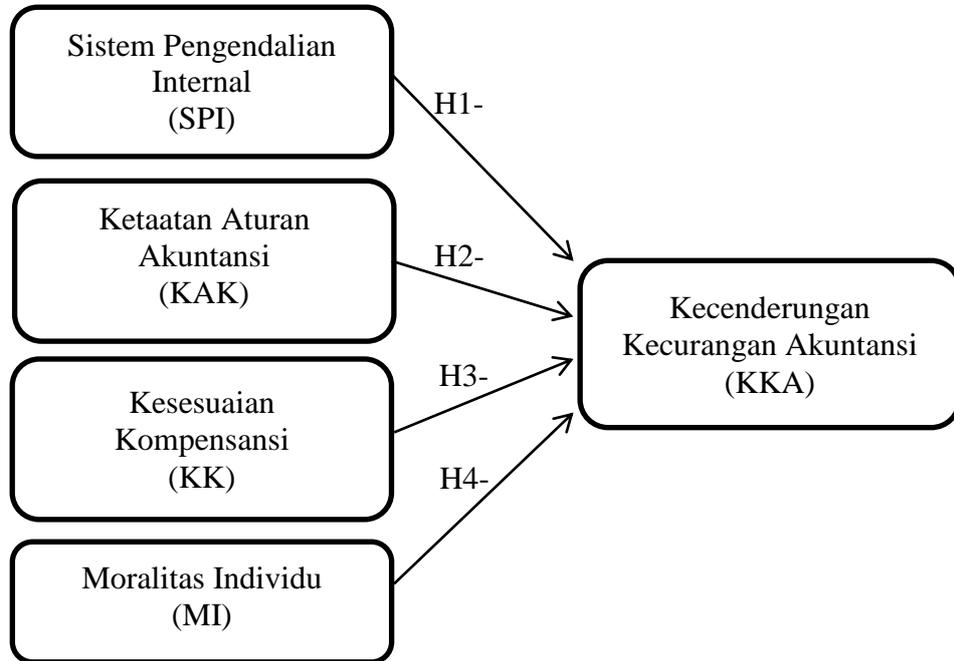
**H3** : Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

#### 4. Pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Moralitas individu adalah suatu tindakan seseorang untuk orang lain yang memiliki nilai positif (Fitri, 2016). Moralitas merupakan kualitas mengenai baik buruknya perilaku seseorang. Seseorang yang bermoral memiliki daya tarik untuk berperilaku baik yang memiliki nilai positif. Seseorang yang tidak bermoral cenderung akan bertindak untuk melakukan kecurangan yang akan merugikan bahkan membahayakan orang lain. Moralitas dalam kecenderungan *fraud* berperan sebagai pengendali yang paling dasar karena dalam *fraud* dimulai dari individu yang berketatanan dalam moral, sehingga moralitas individu dalam mekanisme biaya keagenan berada dalam lingkup *bonding cost* (Radhiah, 2016).

Penelitian Ariani dkk (2014) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian Udayani, A.A.F & Sari, M.R (2017) juga menunjukkan hasil yang sejalan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian Damayanti, D.N.S (2016) dan Tarigan, L.Br (2016) turut menguatkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

**H4** : Moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

**D. Model Penelitian****Gambar 1. Model Penelitian**

## **BAB III**

### **METODA PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006:12) yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.

#### **B. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi yaitu keseluruhan sumber data yang akan digunakan di dalam penelitian. Dalam penelitian sangat penting pengambilan sumber data yang akan berguna untuk menentukan keakuratan suatu hasil yang diteliti (Sugiyono, 2011). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada OPD Kabupaten Magelang.

##### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Pengambilan sampel atas responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria

yang telah ditetapkan peneliti Arikunto (2006:29). Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini.

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. OPD sebagai suatu entitas yang di wakikan oleh responden yang menjalankan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan di OPD Kabupaten Magelang.
- b. Pegawai telah bekerja minimal 3 (tiga) tahun di bagian keuangan dalam lingkungan OPD Kabupaten Magelang.

## **C. Data Penelitian**

### **1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berbentuk numerik. Dalam hal ini data kuantitatif yang digunakan adalah hasil kuesioner yang akan diolah menggunakan program IBM SPSS 25 *for Windows*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yaitu pada pegawai OPD Kabupaten Magelang.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dari sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberika data pada pengumpulan data untuk diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, objektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis (Sugiyono, 2011). Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner.

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara penyebaran langsung kepada sampel penelitian.

#### D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.1 Pengukuran Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
<b>Independen</b>			
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Merupakan yang mencakup metode, proses dan kebijakan suatu yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai tujuan organisasi yaitu pada perlindungan aset dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diimplementasikan di Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah menurut PP Nomer 60 Tahun 2008 (Gustina, 2018)	1. Lingkungan Pengendalian. 2. Penilaian Resiko. 3. Aktivitas pengendalian. 4. Informasi dan komunikasi. 5. Pemantauan. (Gustina, 2018)	Interval

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel (Lanjutan)

Variabel	Definisi	Indikator	Skala	
Ketaatan Akuntansi (KAK)	Aturan Ketaatan Akuntansi kepatuhan menaati pedoman-pedoman digunakan menyusun menyajikan laporan keuangan. Jika laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, maka akan memberikan kesempatan terjadinya kecurangan akuntansi yang akan merugikan pihak pengguna laporan keuangan. (Sinthadevi, 2015)	Aturan adalah dalam pedoman yang digunakan dan laporan keuangan. Jika laporan keuangan tidak disusun standar yang akan memberikan kesempatan terjadinya kecurangan akuntansi yang akan merugikan pengguna laporan keuangan. (Sinthadevi, 2015)	1. persyaratan pengungkapan 2. menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik, 3. objektif, 4. memenuhi syarat kehati-hatian dan memenuhi konsep konsistensi penyajian (Sinthadevi, 2015)	Interval
Kesesuaian Kompensasi (KK)	Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan, yang bersifat finansial maupun nonfinansial pada periode yang tetap. Kompensasi yang sesuai merupakan salah satu faktor kepuasan kerja bagi manajemen serta karyawannya. (Kadarisman, 2012)	Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan, yang bersifat finansial maupun nonfinansial pada periode yang tetap. Kompensasi yang sesuai merupakan salah satu faktor kepuasan kerja bagi manajemen serta karyawannya. (Kadarisman, 2012)	1. kompensasi keuangan 2. promosi 3. penyelesaian tugas 4. pencapaian sasaran <i>personal pressure</i> (Kadarisman, 2012)	Interval

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel (Lanjutan)

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Moralitas Individu (MI)	Moral adalah tindakan yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Pemerintah yang baik akan terbentuk dengan adanya penalaran moral yang baik. (Sanuari, 2014)	1. <i>Pre-conventional</i> 2. Tahapan <i>conventional</i> 3. <i>Post-conventional</i> (Sanuari, 2014)	Interval
<b>Dependen</b>			
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA)	Kecurangan Akuntansi adalah suatu tindak penipuan terencana dengan melanggar aturan akuntansi, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.  (Karyono, 2013)	1. manipulasi, pemalsuan, catatan akuntansi atau dokumen 2. representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan 3. salah penerapan secara sengajaprinsip akuntansi 4. penyajian lap keuangan yang salah akibat perlakuan yang tidak semestinya. (Karyono, 2013)	Interval

Sumber: beberapa artikel yang diolah, 2019.

### E. Metoda Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah terkumpul (Sugiyono, 2011). Dalam

penelitian ini, digunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan suatu bentuk analisis yang diperuntukkan bagi data yang besar yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berwujud angka-angka.

Adapun alternatif jawaban dengan menggunakan skala likert fungsinya yaitu memberikan skor pada masing-masing jawaban pernyataan alternatif tersebut. Kemudian dari alternatif tersebut jawaban tersebut diproses dan diolah untuk dipergunakan sebagai alat pengukur variabel yang diteliti. Kemudian nilai-nilai alternatif jawaban diproses dan diolah untuk digunakan sebagai alat ukur variabel yang diteliti dengan menggunakan perhitungan statistik dengan bantuan komputer melalui program IBM SPSS 25 *for Windows*.

### **1. Uji Validitas Data**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) yaitu analisis faktor yang digunakan dengan tujuan untuk menguji atau mengkonfirmasikan secara empiris model pengukuran (*measurement model*) sebuah atau beberapa konstruk. Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator autonom 1 sampai autonom 4 yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah konstruk

atau variabel autonomi. Jika masing-masing indikator merupakan indikator pengukur konstruk autonomi maka akan memiliki nilai *loading factor* yang tinggi.

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk Ghozali (2001). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja. Pengujian reliabilitas digunakan dengan menggunakan program IBM SPSS 25 for Windows.

Pengukuran *one Shot* hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai  $\alpha > 0,70$  (Ghozali, 2018). Kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,70$ , maka pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur variabel yang diamati “Reliabel”
- b. Jika nilai *Cronbach Alpha*  $< 0,70$ , maka pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur variabel yang diamati “Tidak Reliabel”.

## F. Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan suatu kasus tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji benar atau tidak benar tentang dugaan dalam suatu penelitian serta memiliki manfaat bagi proses penelitian agar efektif dan efisien (Ghozali, 2018). Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini untuk membuktikan hipotesis yaitu sebagai berikut:

### 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independan terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengujian regresi linier berganda digunakan dengan menggunakan program IBM SPSS 25 *for Windows*. Pengujian-pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KKA = \alpha + b_1SPI + b_2KAK + b_3KK + b_4MI + e$$

Ket:

KKA : Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

SPI : Sistem pengendalian internal

KAK : Ketaatan Aturan Akuntansi

KK : Kesesuaian Kompensasi

MI : Moralitas Individu

$\alpha$  : Konstanta

b : Koefisien regresi dari variabel X

e : Kesalahan residual (*error turn*)

## 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat (Ghozali, 2018). Nilai koefisien tererminasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) berarti semakintinggi kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel dependen. Pengujian koefisien determinasi digunakan dengan menggunakan program IBM SPSS 25 *for Windows*.

## 3. Uji F

Uji  $F$  dilakukan untuk melakukan uji terhadap hipotesis, maka harus ada kriteria pengujian yang ditetapkan. Kriteria pengujian ditetapkan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  dengan menggunakan tabel kritis  $F_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi yang telah ditentukan tadi sebesar 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ). Pengujian koefisien F digunakan dengan menggunakan program IBM SPSS 25 *for Windows*.

Hipotesis akan diuji berdasarkan daerah penerimaan dan daerah penolakan yang ditetapkan sebagai berikut:

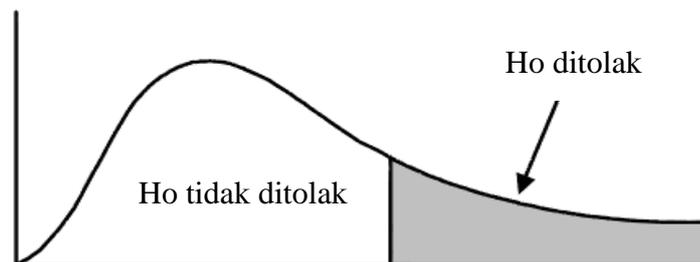
- $H_0$  akan tidak ditolak jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05
- $H_0$  akan ditolak jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05

Atau dengan cara lain sebagai berikut:

- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak
- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  tidak ditolak

Menurut Sugiyono (2014:234), daerah penerimaan dan penolakan

dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. Uji F**

#### 4. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan secara jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Penentuan t tabel menggunakan tingkat signifikansi 5%. Pengujian koefisien t digunakan dengan menggunakan program IBM SPSS 25 *for Windows*.

Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai  $t_{hitung}$  masing-masing koefisien regresi dengan  $t_{tabel}$  (nilai kritis) dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan  $df = n-1$ . Kriteria pengujian adalah :

- a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , atau  $p\ value < \alpha = 0,05$  maka  $h_0$  ditolak dan  $h_a$  tidak ditolak berarti variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , atau  $p\ value > \alpha = 0,05$  maka  $h_0$  tidak ditolak dan  $h_a$  ditolak berarti variabel independen mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

Menurut Sugiyono (2014:240), daerah penerimaan dan penolakan dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3. Uji t**

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Magelang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil uji  $R^2$  menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi dan moralitas individu mampu menerangkan variabel kinerja manajerial.
2. Hasil uji F menunjukkan variabel independen dalam penelitian ini menjelaskan variabel dependen secara baik dan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bagus atau *fit*.
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

#### B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh dari sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi saja. Masih

terdapat banyak variabel lain yang mampu mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi.

2. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan dalam lingkungan OPD Kabupaten Magelang. Masih banyak obyek penelitian lain diluar bagian keuangan dalam lingkungan OPD Kabupaten Magelang yang bisa diteliti untuk penelitian selanjutnya.

### **C. Saran**

1. Penelitian berikutnya bisa menambahkan variabel lain yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi seperti motivasi kerja. Motivasi kerja adalah keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, menggerakkan dan menyalurkan perilaku kearah pencapaian kebutuhan yang memberikan kepuasan. Kecenderungan kecurangan akuntansi akan lebih berkurang apabila individu dalam suatu organisasi memiliki motivasi kerja yang baik.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas obyek penelitian, misalnya mencakup seluruh pegawai dalam lingkungan OPD Kabupaten Magelang. Sehingga lebih dapat diketahui detail tentang kecenderungan kecurangan akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahriati, D., Basuki, P., & Widiastuty, E. 2015. Analisis pengaruh sistem pengendalian internal, asimetri informasi, perilaku tidak etis dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal InFestasi*. Vol. 11, No.1, Hlm. 41-55.
- Albrecht, W.S. 2003. *Fraud Examination*. Western. USA :Thomson South.
- Amalia, R.D. 2015. Pengaruh keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, moralitas aparat dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura). *JOM Fekon* Vol. 2 No. 2.
- Amrizal. 2004. "Pencegahan dan Pendeteksian kecurangan oleh internal auditor". BPKP.
- Ariani, K.S, dkk. 2014. Analisis Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Di PDAM Kabupaten Bangli. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 2 No:1. 34-47.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rhineka Cipta.
- Astuti, W.A & Rahayu. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Unikom.
- Baswir, R. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi 3. BPFE: Yogyakarta.
- Damayanti, D.N.S. 2016. Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Terhadap Kecurangan Akuntansi Akuntansi (studi eksperimen pada pegawai bagian keuangan dan akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta). *Jurnal Nomina*. Vol 5, No. 2. 53-67.
- Dewi, C.K.R. 2017. Pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi empiris pada SKPD Kabupaten Bengkalis). *JOM fekon*. Vol: 4, No. 1.
- Eliza, Y. 2015. Pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi empiris pada SKPD di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 4, No. 1. 86-100.
- Fajarina, W., Darwanis & Usman, A.B. 2012. Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Serta Pemantauan Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan

Barang/Jasa Pada SKPD di Pemerintah Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol.1 No.1.

- Fitri, Y. 2016. Pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal, ketaatan akuntansi, asimetri informasi dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau). *Jom Fekon*. Vol. 3 No. 1.
- Ghozali, I. 2018. *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Griffin, R. 2004. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Gustina, I. 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Skpd Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7, No. 2.
- Halim, A. 2003. *Auditing (Jilid 1)*. Yogyakarta: UPP AA YKPN.
- Iqbal, H. 2003. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadarisman. 2012. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Mathis, L.R & Jackson, H. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Buku Kedua.
- Muna, B.N & Harris, L. 2018. Pengaruh Pengendalian Internal Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Penelitian Persepsi Pengelola Keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri BLU). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. Vol. 6, No. 2.
- Muttaqin, A.N & Sudarno. 2012. Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Dan Faktor Non Keuangan Terhadap Penerimaan Audit Going Concern. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 1, No. 2, Hlm. 1-13.
- Nordiawan, D & Putra, S. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prawira, I. M. D., Herawati, N. T & Darmawan, N. A. S. 2014. Pengaruh moralitas individu, asimetri informasi dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi (Studi empiris pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng). *EJournal SI Ak. Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 2 No. 1.

- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2008. *Filosofi Auditing Edisi Kedua*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Radhiah, T. 2016. Pengaruh efektifitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi kasus pada PT. POS Indonesia KCU Kota Pekanbaru). *JOM Fekon*. Vol.3 No.1.
- Rahmaidha, T.R. 2016. Pengaruh Pengendalian internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kecurangan Akuntansi (studi pada SKPD di Kota Magelang). *Jurnal Nomina*. Vol 5, No. 7.
- Rahmawati. 2012. *Teori Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ruslan, R. 2011. *Fraud Sebagai Sebuah Audit*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanuari, N. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi Dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 16 No. 2. Hlm. 144-163.
- Sari, N.L.P.P, Gede A.Y, & Adiputra, I.M.P. 2015. Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan *Fraud* (Studi Empiris Pada SKPD di Kabupaten Tabanan). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 3, No.1.
- Sawyer, L.B, Mortimer A.D & James, H.S. 2006. *Internal Auditing*. Jakarta: Salemba Empat
- Sefiana, E. 2009. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan yang telah Go Publik di BEI. *Skripsi*. Universitas Gunadharma Jakarta.
- Shintadevi, P.F. 2015. Pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening. *Jurnal Nominal*. Vol. 4 No. 2.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sukanto, R.H. 2009. *Organisasi Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.

- Sukirman, E.W. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela dan implikasinya terhadap asimetri informasi. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Tanjung, A.H. 2006. *Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, L.Br. 2016. Pengaruh moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi pada BUMD Provinsi Riau). *JOM Fekom*. Vol.3 No 1. 896-909.
- Tessa, C.G. 2016. Fraudulent Financial Reporting: Pengujian Teori Fraud Pentagon pada Sektor Keuangan dan Perbankan di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. Lampung.
- Thoyibatun, S. 2009. Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintahan Daerah. *SNA XV 20-23 September 2012*.
- Thoyibatun, S. 2012. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 16, No. 2.
- Tuanakotta, T.M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Udayani, A.A.F & Sari, M.R. 2017. Pengaruh sistem pengendalian internal dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.18. No. 3.
- Ulum, I. 2009. *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Veithzal, R. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wilopo. 2006. Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi: Studi pada perusahaan publik dan badan usaha milik Negara di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*, Hlm 21-69.
- Yudistira, I.G.A.N, et al. 2017. Pengaruh Aspek Tekanan, Penegakan Peraturan, Rasioanlisasi, dan Wewenang Pegawai Terhadap *Fraud* (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Karangasem). *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol: 8 No: 2.

Yulianti, D.F 2016. Pengaruh moralitas individu, penegakan hukum, keadilan distributif, keadilan prosedural terhadap kecenderungan kecuranganakuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *JOM Fekon*. Vol. 3 No. 1.

<http://www.antikorupsi.org/read/2017/03/14/140044626/kasus.korupsi.yang.melibatkan.asn/>. Diakses pada 02 Mei 2019.

<http://news.detik.com/read/2017/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura/>. Diakses pada 02 Mei 2019.

<http://www.wawasan.co/news/detail/8865/kepala-upt-pu-kecamatan-bandongan-jadi-tersangka-korupsi/>. Diakses pada 03 Mei 2019.

<https://www.nasional.sindonews.com/read/2015/10/06/peristiwa/kecurangan-developer-terhadap-pajak-properti.html/>. Diakses pada 02 Mei 2019.